



KAMPUNG DERET sebagai proyek unggulan Pemprov DKI.... halaman 3



SOSIALISASI PETA INDIKASI
BKPRN menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tingkat Eselon II
halaman 2



WORKSHOP KNOWLEDGE MANAGEMENT
Workshop KM bertujuan untuk sosialisasi dan diskusi aktif dengan saling berbagi
halaman 2



RESENSI BUKU: HAK ATAS TANAH
Kekuatan sertifikat merupakan jaminan kepastian hukum bagi pemegang sertifikat
halaman 4

NEWSLETTER TATA RUANG PERTANAHAN

MEDIA INFORMASI BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN

EDISI 2 / MARET 2014

KILAS BALIK:

Dinamika Isu Tata Ruang dan Pertanahan

ISU TATA RUANG :

Sepanjang Februari, normalisasi sungai dan situ-situ menjadi prioritas utama yang diusung dalam pemberitaan. Normalisasi sungai ini dilakukan untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dan pencegahan bencana. Program normalisasi juga bisa jadi momentum untuk beberapa tujuan sekaligus, antara lain pelestarian sungai, pengendalian banjir, pemenuhan air bersih, penataan kota, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan berbagai potensi ekonomi yang bisa diputar. Terkait normalisasi, perlu adanya relokasi yang jitu, termasuk menyiapkan permukiman baru.

Selain normalisasi sungai, perlu ada tinjauan ulang mengenai izin pertambangan yang berdampak pada pembangunan serta tinjauan ulang mengenai kebijakan tata ruang wilayah nasional terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana. Di tengah keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana dalam pengembangan kawasan, maka kemitraan dengan dunia usaha mempunyai peran penting untuk mewujudkan RTRW di daerah.

ISU PERTANAHAN:

Hak atas tanah tetap menjadi mayoritas isu di bulan Februari ini. Hak atas tanah yang diwujudkan dalam SHM juga menjadi salah satu permasalahan bagi masyarakat adat dalam proses penetapan kawasan hutan dan realitas pengurusan kehutanan di Indonesia. Mayoritas masyarakat hukum adat di sekitar dan dalam kawasan hutan tak dapat menikmati sumber daya setempat dikarenakan pemberian izin konsesi bagi kelompok-kelompok usaha besar bidang tanaman industri dan perkebunan. Pembebasan lahan menjadi isu berikutnya terutama jika

dikaitkan dengan revitalisasi lingkungan. Saat normalisasi sungai dilakukan, perlu ada relokasi dan pembebasan lahan milik masyarakat di bantaran sungai. Namun hal tersebut masih menjadi kendala utama, karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjadi lingkungan, selain harga tanah yang semakin mahal. Terkait dengan lingkungan, pemerintah wajib berdiri paling depan untuk menyusun standar kelestarian sesuai kondisi Indonesia dan memenuhi kaidah ilmiah yang diakui internasional. Penyusunan standar harus melibatkan pemangku kepentingan agar menghasilkan acuan kelestarian yang aplikatif.



POTRET KEGIATAN:

Sosialisasi Rancangan Peta Arahkan Indikasi

Kawasan Pertanian Nasional dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Jakarta, Kamis (19/2), BKPRN menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tingkat Eselon II di kantor Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Kementerian Pertanian, Pasar Minggu Jakarta. Rapat tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Eselon II BKPRN (5/2) terkait perlunya sosialisasi arahan lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Agenda rapat yakni koordinasi dan harmonisasi dalam rangka sosialisasi Peta Indikasi Arahkan Kawasan Pertanian Nasional dan LP2B. Pada rapat yang dibuka oleh Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Dr. Ir. Oswar Mungkasa, MURP, menghadirkan pula

Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Kementerian Pertanian, Ir. Prasetyo Nuchsin, MM, selaku tuan rumah dan Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, Dr. Ir. Budi Situmorang, MURP.

Agenda yang dibahas dalam rapat tersebut di antaranya: pemaparan konsep LP2B dan sosialisasi rancangan Peta Arahkan Indikasi Kawasan Pertanian Nasional dan LP2B. Pada pemaparan konsep LP2B, pembahasan difokuskan pada dua hal, yakni: (i) Mekanisme penetapan LP2B, dan (ii) *Pending Issues* terkait penerapan LP2B. Terkait dengan sosialisasi Peta Arahkan Indikasi dibahas

pula mengenai arahan lokasi LP2B.

Pada pertemuan ini dipandang perlu adanya penyusunan *roadmap* yang baik. Terkait dengan peta arahan indikasi dan penetapan lokasi LP2B, BIG akan turut membantu untuk menyiapkan peta terbaru.



Workshop Knowledge Management

Pada tanggal 20 Februari 2014, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Bappenas, menyelenggarakan Workshop *Knowledge Management* di Hotel Akmani, Jakarta. Workshop *Knowledge Management* bertujuan untuk sosialisasi dan diskusi aktif dengan saling berbagi dan belajar dalam mengupas konsep *Knowledge Management* serta memulai penerapannya di Kementerian PPN/Bappenas, khususnya di Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, terutama terkait dengan kebijakan bidang tata ruang dan pertanahan.

Ir. Haitan, MT selaku nara sumber memaparkan materi mengenai 1) Konsep *Knowledge Management*, 2) *Knowledge Mapping* (K-Map), 3) *Knowledge Portal*, dan 4) *Knowledge Management* yang akan diterapkan di Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan. Para peserta diajak untuk mempraktekkan konsep KM dengan data dan informasi masing-masing bidang.

Penyusunan K-Map ini diharapkan dapat dioptimalkan dalam pendistribusian informasi secara keseluruhan dan berkelanjutan.



Kick Off Meeting Kegiatan Evaluasi

Bidang Tata Ruang dan Pertanahan 2014

Dalam rangka mengevaluasi program kegiatan yang sudah berjalan di tahun 2013, mengenai bidang Tata Ruang dan Pertanahan, pada tanggal 26 Februari 2014, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan menyelenggarakan *Kick Off Meeting* Kegiatan Evaluasi Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Program Pengelolaan Pertanahan Tahun 2014. Pertemuan ini berlokasi di Ruang SS 1-2 Bappenas, Jalan Taman Suropati No.2 - Jakarta Pusat.

Pertemuan ini bertujuan untuk memperoleh masukan terhadap hasil evaluasi 2013 Bidang Tata Ruang Pertanahan dan masukan terhadap

rencana kegiatan evaluasi 2014 dari mitra K/L Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, yaitu: 1) Ditjen Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum; 2) Ditjen Bina Bangda, Kemendagri, dan 3) BPN. Pertemuan ini juga memfasilitasi direktorat mitra K/L di Kementerian PPN/Bappenas dengan Kementerian PU, Kemendagri, dan BPN dalam koordinasi lintas sektor bidang tata ruang dan pertanahan.

Dalam RPJMN 2010-2014, kegiatan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang (PB-PPR) merupakan salah satu kegiatan Prioritas Nasional (PN) 6: Infrastruktur. Sementara itu, untuk Prioritas Bidang Reforma Agraria (PB-RA),

beberapa kegiatan masuk ke dalam PN 4: Penanggulangan Kemiskinan, PN 5: Ketahanan Pangan, PN 6: Infrastruktur, PN 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha dan PN 14: Kesejahteraan Rakyat.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pertanahan Nasional sebagai mitra K/L dari Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas. Dalam kaitan itu, sesuai tupoksinya Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan bertanggung jawab melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PB PPR dan PB RA.

Penataan Daerah Kumuh Melalui Pembangunan Kampung Deret



sumber gambar: www.tender-indonesia.com

Pemprov DKI menjadikan pembangunan kampung deret sebagai salah satu penataan kampung kumuh di Ibukota. Program pembenahan kampung deret itu termasuk pemberian bantuan berdasarkan nama pemilik rumah, sesuai alamat rumah yang akan ditata. Juga mengenai jumlah bantuan dana renovasi yang diberikan. Pemprov DKI memberikan Rp 1,5 juta untuk 1 meter. Dengan maksimal luas tanah 36 meter persegi sehingga diperkirakan paling tinggi dananya sebesar Rp 54 juta tiap rumah.

Melalui program ini, Pemprov akanmerenovasi pemukiman penduduk yang kumuh agar menjadi lebih layak huni dan sehat. Selain itu, tiap kampung juga memiliki tema berbeda yang disesuaikan dengan karakter wilayahnya masing-masing, namun yang jelas di bagian depan dan belakang rumah harus ada saluran air serta ruang terbuka, bukan umpek-umpekan seperti kampung kumuh padat hunian.

Tahun 2013 sudah ada 26 lokasi yang dibuat kampung deret dan tahun ini rencananya akan dibuat 70 kampung seperti itu. Pembangunan kampung deret di 70 lokasi yang berbeda itu belum diberitahukan lokasinya, rencananya akan dibangun Juni 2014 karena harus menyiapkan penyusunan gambar dan penetapan lokasi. Adapun daftar 26 lokasi kampung deret tersebut sebagai berikut: (1) Jakarta Pusat: Kelurahan Petojo Utara, Kemayoran, Utan Panjang, Galur, Tanah Tinggi, Karang

Anyar, Bungur, Bendungan Hilir, Cempaka Putih Barat, dan Kelurahan Kebon Sirih; (2) Jakarta Utara: Kelurahan Pejagalan, Tugu Utara, Cilincing, Semper Barat, Marunda, dan Kelurahan Pademangan Timur; (3) Jakarta Barat: Kelurahan Tambora, Kalianyar, dan Kelurahan Kapuk.; (4) Jakarta Selatan: Kelurahan Petogogan, Gandaria Selatan, dan Kelurahan Pasar Minggu; (5) Jakarta Timur: Kelurahan Klender, Pisangan Timur, Jatinegara, dan Kelurahan Cipinang Besar Selatan.

Jokowi mengatakan, dari 70 lokasi yang tengah disusun, pihaknya menargetkan akan melaksanakan program kampung deret sebanyak 15 lokasi di setiap lima wilayah administrasi di Jakarta. Untuk mengatakan pendanaan kampung deret ini akan dilakukan secara terkendali. "Kalau bangunan sudah selesai 40 persen baru turun (dananya), 80 persen selesai baru turun (lagi)," katanya. Kampung deret telah dibangun di sejumlah daerah kumuh seperti di Tanah Tinggi dan Petotogan. Konsep ini dengan meruntuhkan bangunan lama dan membangun baru.

Berbagai Kendala

Pada pembangunannya, kampung deret tidak lepas dari berbagai kendala. Salah satunya, pembangunan kampung deret di Petogogan yang *ngaret*. Pembangunan seharusnya sudah selesai Februari 2014 tetapi masih dalam proses 50% pengerjaan. Para pekerja menyalahkan cuaca sebagai penyebabnya, mereka menyebutkan

bahwa hujan dan banjir menjadi kendala terbesar dalam pembangunan rumah-rumah minimalis tersebut. Di beberapa daerah lain, jalan sempit dan warga yang tidak kooperatif menjadi kendala.

Selain itu, terkait dengan anggaran, masyarakat melapor terdapat pembagian dana bantuan pembangunan proyek yang berbeda-beda, seperti kampung deret di Jalan Rawamangun Selatan, Pisangan Timur, Pulogadung, Jakarta Timur. Padahal sejak awal, Pemprov DKI memberikan Rp 1,5 juta untuk 1 meter, tetapi yang terjadi perhitungannya menjadi Rp 1 juta untuk 1 meter.

Ada pula masyarakat mengeluh soal pungutan konsultan sebesar Rp 1 juta, untuk program pembangunan kampung deret di berapa daerah salah satunya di RW 015 Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur. Kasus lain yang terjadi melibatkan mandor proyek. Mandor proyek itu diduga membawa kabur 40 persen uang muka Kampung Deret. Akibatnya, 55 rumah warga di RW 006 Jalan Kalibaru Timur, Senen, Jakarta Pusat, terpaksa dihentikan pembangunannya.

Walaupun demikian, Jokowi tetap optimis bahwa program kampung deret yang dibangunnya akan menjadi penataan Jakarta yang lebih baik. Dengan mulai terlihatnya hasil pembangunan kampung deret, kepercayaan masyarakat akan program ini pun mulai meningkat. (dari berbagai sumber)

LINK TERKAIT

Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan,
Bappenas
Portal Tata Ruang dan Pertanahan
Sekretariat BKPRN

Potret Kegiatan TRP

Sosialisasi Peta Arahkan Indikasi
Workshop *Knowledge Management*
Kick Off Meeting Evaluasi



Layanan Informasi Pertanahan Dapat Diminta Melalui SMS ke 2409

Kepala Badan Pertanahan Nasional Hendarman Supandji menandatangani Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan SMS (Short Message Service) Informasi Pertanahan dengan sembilan penyedia layanan telekomunikasi di Aula Prona BPN RI, Jakarta, Kamis (13/2). Dengan penandatanganan kerja sama tersebut maka seluruh warga masyarakat dapat meminta layanan informasi pertanahan dengan cara mengirim SMS ke nomor 2409.

Kesembilan penyedia layanan telekomunikasi yang terlibat dalam perjanjian kerja sama tersebut adalah PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk; PT. Telekomunikasi Selular; PT. Indosat, Tbk; PT. XL Axiata, Tbk; PT. Hutchison 3 Indonesia; PT. Smart Telecom; PT. Smartfren Telecom, Tbk; PT. Bakrie Telecom, Tbk; dan PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia.

Dalam sambutannya Kepala BPN RI mengatakan, kode akses "2409" memiliki

makna mendalam untuk BPN RI. Selain mudah diingat, "2409" merupakan kombinasi angka yang merepresentasikan tanggal dan bulan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yakni tanggal 24 bulan 09 (September), paparnya.

Berikut adalah Format Layanan SMS Kode Akses 2409 Sebagai layanan Informasi Pertanahan :

No.	Informasi	Format Perintah	Contoh
1.	Informasi Berkas	BERKAS(spasi)NOMOR BERKAS/TAHUN(spasi)PIN	BERKAS 1001/2013 2801-1234
2.	Informasi Biaya		
	Biaya Pengukuran	UKUR(spasi)KODE PROPINSI(spasi)LUAS TANAH	UKUR 26 5000
	Biaya Pemberian Hak	PEMBERIAN(spasi)KODE PROPINSI(spasi)LUAS TANAH	PEMBERIAN 26 1000
	Biaya Konversi	KONVERSI(spasi)KODE PROPINSI(spasi)LUAS TANAH	KONVERSI 26 1000
	Biaya Pengakuan Hak	PENGAKUAN(spasi)KODE PROPINSI(spasi)LUAS TANAH	PENGAKUAN 26 1000
	Biaya Peralihan Hak	PERALIHAN(spasi)LUAS TANAH(spasi)NILAI TANAH	PERALIHAN 1000 1000000
3.	Pengaduan	PENGADUAN#NAMA#NOMOR TELEPON#ADUAN	PENGADUAN#BUDIMAN#0811000000#ISI PENGADUAN SAYA
4.	Informasi Kode Propinsi	KODE(spasi)PROPINSI	KODE PROPINSI

Sumber: BPN

RESENSI BUKU:

Sertifikat Hak Atas Tanah

Sertifikat merupakan alat bukti yang kuat dan autentik. Kekuatan sertifikat merupakan jaminan kepastian hukum bagi pemegang sertifikat sebagai alat bukti yang sempurna sepanjang tidak ada pihak lawan yang membuktikan sebaliknya.

Dalam praktiknya, pemegang sertifikat tanpa jangka waktu tertentu dapat kehilangan haknya disebabkan gugatan pihak lain yang berakibat pembatalan sertifikat disebabkan cacat hukum administrasi. Dengan adanya cacat hukum administrasi menimbulkan sertifikat ganda karena sertifikat tidak dipetakan dalam peta pendaftaran rumah. Hal tersebut mengakibatkan persengketaan di bidang pertanahan yang akan menimbulkan konflik-konflik berkepanjangan antar-warga masyarakat yang bersengketa.

Terkait dengan hal ini, masyarakat perlu mendaftarkan tanah guna memperoleh sertifikat hak atas tanah yang berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan hak atas tanah. Buku ini menjelaskan tujuan dikeluarkannya sertifikat hak atas tanah yang telah sesuai dengan maksud dan tujuan dari para pembuat Undang-Undang dan membahas mengenai tinjauan kekuatan yuridis sertifikat hak atas tanah dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia.



Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi kami:

DIREKTORAT TATA RUANG DAN PERTANAHAN,
BAPPENAS
Jalan Taman Suropati No. 2A
Gedung Madiun Lt. 3

T : 021 392 7412
F : 021 392 6601
E : trp@bappenas.go.id
W: www.trp.or.id

